



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 09 Mei 2026

Halaman: 2

TERAS

Pendampingan Korban

PEMERINTAH Kota Yogyakarta membentuk Tim Hukum Peduli Anak untuk mengawal kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Ansha. Pertemuan dengan para orang tua korban pada Rabu (9/5) menegaskan komitmen pemerintah menjadi motor penggerak dalam mencari keadilan. Dengan melibatkan koalisi lintas lembaga seperti Peradi, PKBH UAD, hingga Rifka Annisa, Pemkot Yogyakarta menyadari bahwa kompleksitas kasus ini memerlukan amunisi hukum yang solid dan jangka panjang yang lebih luas.

Kehadiran Tim Hukum Peduli Anak memberikan harapan baru melalui layanan advokasi pro bono yang menjanjikan pendampingan hingga status hukum perkara mencapai kekuatan tetap atau inkracht. Strategi hukum yang disusun dengan tiga aliansi utamadapatanggungjawab personal, pertanggungjawaban badan hukum (yayasan), dan pemenuhan hak restitusimenunjukkan kedalaman analisis dalam penanganan kasus ini.

Upaya mengejar pidana korporasi terhadap yayasan pengelola bukan sekadar langkah administratif, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa setiap institusi pendidikan atau penitipan anak memiliki tanggung jawab moral dan legal yang besar. Ancaman ganti rugi hingga pembubaran korporasi bagi entitas yang lalai melindungi anak-anak diharapkan mampu menjadi efek jera yang nyata bagi penyedia jasa serupa di masa depan.

Upaya mengejar hak restitusi melalui kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi titik terang bagi pemulihan jangka panjang para korban. Fokus pada aset yayasan, bukan hanya harta pribadi pelaku, merupakan langkah taktis untuk memastikan kompensasi yang diterima sepadan dengan kerugian yang diderita.

Penyelesaian kasus Little Ansha akan menjadi standar baru bagi perlindungan anak di Kota Yogyakarta. Komitmen pendampingan psikologis yang berjalan beriringan dengan proses hukum menunjukkan pemahaman komprehensif pemerintah terhadap dampak trauma pada anak. Kita berharap konsistensi tim ini tidak kendur di tengah jalan, sehingga keadilan benar-benar tegak di ruang pengadilan. Keberhasilan penanganan kasus ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi tentang mengembalikan rasa aman bagi setiap orang tua yang menitipkan masa depan anak-anak mereka pada institusi pendidikan di kota ini. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005